

# EFEKTIFITAS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OLEH TIM EVALUASI PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Sukmawati**

*sukmawati1981@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study was conducted to analyze the Effectiveness of Program Activity Report Drafting by Budget Absorption Evaluation Team at Central Sulawesi Board of Village Governance and Community Empowerment. This study used descriptive research type where the researcher was a key instrument, with snowball and purposive sampling. The analysis of data used in this study was inductive and qualitative, where it put more emphasis on meanings than on generalizations (Sugiyono, 2009: 15). Data was collected by means of interviews, observations, and documentations. The results show that the effectiveness could be seen from two things, namely from the state of organization called organizational effectiveness and from the results achieved called work effectiveness, Both of these factors were important factors in determining the Effectiveness of Program Activity Report Drafting by Budget Absorption Evaluation Team at Central Sulawesi Board of Village Governance and Community Empowerment.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Early Childhood Education*

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota adalah rendahnya realisasi belanja pada awal-awal tahun dan umumnya selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. Akibatnya anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat dalam bentuk pelayanan publik pemerintah, terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena pemerintah cenderung membelanjakannya di akhir tahun. Padahal apabila realisasi belanja dilaksanakan di awal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain.

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran khususnya pada awal tahun anggaran dan cenderung menumpuk diakhir tahun merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari evaluasi yang

dilakukan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2012. Akibatnya adalah anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya dalam bentuk pelayanan publik melalui program maupun kegiatan pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena pemerintah cenderung membelanjakannya di akhir-akhir tahun. Padahal apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektifitas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.”

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei sebagai salah satu jenis penelitian ilmiah (Scientific research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian survei bertujuan yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan media wawancara dan kuesioner.

Informan Penelitian dilakukan secara purposive, yakni memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan di pandang paling mengetahui fenomena penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka jumlah informan yang di pilih dan dianggap mampu memberikan informasi yang terkait dengan penelitian sebagai berikut : Sekretaris BPMPD Prov. Sulteng, Kepala Sub Bagian Perencanaan BPMPD Prov. Sulteng, Kepala Sub Keuangan dan Asset BPMPD Prov. Sulteng Kepala Sub Pengendalian dan Program Biro Ekonomi Dan Pembangunan dan Operator TEPRAs BPMPD Prov. Sulteng.

Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan/digunakan adalah :

- a. Observasi, merupakan teknik yang dilakukan melalui pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui langsung berbagai hal atau kondisi yang berada di lapangan.
- b. Wawancara, Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur dan terfokus pertanyaan diformulasikan dengan harapan agar informan menjawab sesuai dengan kerangka pikir dan defenisi permasalahan yang telah dirumuskan.
- c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mencatat/ menyalin dan melalui fotocopy data/ yang berwarna yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif dan Miles dan Huberman (Sugiyono,2012;92) sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Pengurangan data)  
Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik
2. Display data (penyajian data)  
Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap.
3. Menarik kesimpulan/ Verifikasi  
Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai

Perpres 54 tahun 2010 berisi mengenai kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh TEPRAs yaitu memperlancar penyerapan anggaran, Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRAs) dimana TEPRAs mengeluarkan beberapa langkah kerja berupa penyederhanaan prosedur, kewajiban penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan, maupun kewajiban memantau, melaporkan dan mempublikasikan perkembangan penyerapan anggaran membenahi pola *reward and punishment*, melaporkan kepada Presiden kemajuan penyerapan anggaran pada bulan April, Agustus dan November, dan mengumumkan perkembangan penyerapan Anggaran pada publik. Karena belum ada pengalokasian dana untuk sosialisasi TEPRAs di kabupaten/dan kota otomatis pemantauan perkembangan penyerapan anggaran di kabupaten kota belum maksimal.

Sosialisasi TEPRAs dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan secara

sistematis di masing-masing SKPD khususnya untuk kota Palu dan Kabupaten Sigi. Semuanya itu kemudian harus dilaporkan secara berjenjang, agar pelaksanaannya semua pelaporan realisasi anggaran yang ada di Kota dan Kabupaten Sigi dapat terlaksana dengan maksimal.

Semua SKPD yang sudah menggunakan TEPRa wajib mengikuti Pra Rapim dan Rapim sehingga perkembangan fisik kegiatan, serapan dana, proses pelelangan yang ada di Kabupaten Sigi dan kota Palu bisa di pantau dengan baik.

Bapak Sirhan, SE, M. Si selaku Kasubag Keuangan dan Program BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan pada penulis pada tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut:

*“....Keppres juga memberikan kewenangan kepada TEPRa untuk berkoordinasi dan meminta kepada para Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, pimpinan Sekretariat Lembaga Negara Gubernur, dan Bupati/Walikota menyampaikan segala informasi, dokumen, dan data yang diperlukan oleh TEPRa dalam menjalankan tugas evaluasi dan pengawasan dimaksud (Pasal 4 Keppres Nomor 20 Tahun 2015). Sangat jelas kepres yang bisa kita pelajari bahwa TEPRa sangat membantu serta efektif dan efisien dan bisa sangat jelas terlihat pada saat DESK dan RAPIM yang di pimpin langsung oleh Gubernur”*

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti atas wawancara di atas bahwa TEPRa mempunyai kejelasan tujuan yang hendak di capai yaitu pengendalian percepatan penyerapan belanja daerah, mengkoordinasikan langkah-langkah strategis, serta diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, serta penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal dan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dengan

adanya TEPRa merupakan rangka kedisiplinan dan transparansi pada pelaporan program kegiatan yang dikelola setiap setiap SKPD khususnya BPMPD

## 2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa keterangan dalam penggunaan format TEPRa pada laporan keuangan BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan bahwa eksekusi pencapaian target realisasi dengan baik untuk memenuhi targetnya, Efisien dalam pelaksanaannya, Efektif mencapai tujuannya, dan Berbagai indikator lain yang mewakili kinerja dan kualitas.

Indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran diatas menjelaskan bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran lebih diarahkan pada penggunaan, pemenuhan target, dan dampak yang ditimbulkan dari belanja pemerintah, bukan tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Dalam analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran yang telah dilakukan BPMPD Prov. Sulteng lebih menampatkan tingkat realisasi anggaran sebagai petunjuk awal yang ditindaklanjuti dengan penelusuran belanja dan pengembangan analisis kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Kasub Pengendalian Program biro Ekonomi dan Pembangunan bapak Eliyas Saranga, SH pada tanggal 7 Maret 2016 dinyatakan sebagai berikut:

*“....Kendala yang kemudian muncul dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah masalah data pencapaian tujuan, target, efektivitas dan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Biro EKBANG yang masih belum terakomodir dalam sistem yang ada, sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan pendataan secara konvensional kepada masing-masing SKPD. Pentingnya data capaian output dan capaian prestasi fisik pekerjaan/kegiatan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. pelaksanaan anggaran sebenarnya telah*

*dilakukan oleh BPMPD tetapi karna perlunya tanggal dan bulan yang pasti dalam pencapaian target sehingga BPMPD terus mendapatkan tempat merah karna BPMPD mengerjakan realisasi untuk bantuan selalu mengacu pada anggaran awal, dimana saya tidak dapat memastikan putaran uang awal yang diberikan pada PPTK bisa tepat waktu.”*

Setiap Pengelola Program Kegiatan yang ada di bidang BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah harus bisa menempatkan program kegiatan apa saja yang akan terlaksana maksimal tiap bulannya agar supaya putaran awal untuk pelaksanaan Program kegiatan tepat waktu sehingga pencapaian tujuan, target, efektivitas dan efisiensi belanja BPMPD tiap bulannya bisa maksimal sesuai dengan yang telah di sepakati.

Anggaran Belanja BPMPD tahun 2016 bertambah dari anggaran tahun sebelumnya sebesar 15% dimana anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 16.138.891.224 dan anggaran 2016 sebesar Rp.20.548.494.804.

Tanggal 14 maret 2016 Kasubag Perencanaan dan Program pada BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah bapak Mohamad Sirhan, SE, M. Si berkomentar  
*“....Apabila Kerja sama antar bidang yang mengelola program kegiatan dan operator TEPRRA yang ada di SKPD tidak berjalan dengan baik maka operator akan kewalahan dalam mencari data fisik dan keuangan yang akan di input di sistem TEPRRA”*

Dalam bekerja tentunya kita tidak melakukannya secara sendiri, Mungkin kita berurusan dengan rekan kerja Anda yang lainnya guna menyelesaikan sebuah pekerjaan. Begitu pun dalam pengelolaan Pelaporan TEPRRA, dimana menjalin hubungan baik antara pelaksana Program dan Operator tepra akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sehingga Pengelola Program Kegiatan harus selalu mengetahui apa saja kendala Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada

Programnya sehingga yang paling penting di bangun adalah komunikasi yang baik.

Bendahara pengeluaran juga punya peran penting pada pelaporan TEPRRA dimana bendahara tiap bulannya mengetahui seberapa besar putaran uang persediaan tiap bulannya yang digunakan untuk pelaksanaan Program kegiatan yang ada di BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah. Bendahara pengeluaran tiap bulannya punya Laporan yang dilaporkan kepada kepala BPMPD seberapa besar sisa kas dan seberapa besar uang yang digunakan untuk Program Kegiatan.

Tanggal Tanggal 14 Maret 2016 Sekretaris BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Joko Hariyanto, M. Si berkata,  
*“....Tiap pimpinan SKPD harus mengetahui apa saja kendala yang hadapi operator dalam penginputan anggaran realisasi Program kegiatan di SKPD, agar supaya bukan hanya operator TEPRRA saja yang melakukan strategi atau tindakan untuk pelaporan tepat waktu akan tetapi semua unsur yang terkait dengan Program kegiatan yang ada di SKPD. Semua itu bisa diputuskan dengan rapat-rapat tiap bulannya yang dipimpin oleh Kepala BPMPD dengan cara mengumpulkan semua PPTK, Bendahara, Operator dan semua perangkat yang berkaitan dengan pelaporan TEPRRA”*

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pimpinan SKPD harus secara rutin tiap bulan nya melaksanakan rapat intern di SKPD agar supaya bisa diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan pelaporan TEPRRA tiap bulannya, dan bisa secara bersama sama memutuskan Strategi apa saja yang dilakukan agar supaya Program Kegiatan yang di SKPD bisa dilaksanakan tepat waktu.

Semua perangkat yang ada di BPMPD harus bekerja sama dalam pelaporan semua Program Kegiatan yang ada. Dimana semua PPTK harus menentukan Program kegiatan apa saja yang dilaksanakan tepat waktu tiap bulannya, harus mengumpulkan dokumen dokumen pelaporan yang sudah dilaksanakan

dan menjalin komunikasi yang baik agar diketahui apa saja pelaporan dokumen apa saja yang kurang.

Pelaksanaan rapat mengenai Pelaporan TEpra tiap bulannya di SKPD akan berdampak baik juga pada Efektivitas Pelaporan TEpra pada Pra Rapim dan Rapim di tingkat Provinsi yang di pimpin langsung oleh Gubernur.

### 3. Proses Analisa dan Perumusan Tujuan

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran khususnya pada awal tahun anggaran dan cenderung menumpuk diakhir tahun merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari table realisasi format tepra dimana pada bulan Maret Realisasi BPMPD masih rendah yaitu sebesar RP.1.630.894.514 Dengan persentase sebesar 7.94%.

*“.... Penyerapan Anggaran BL di pada awal tahun tepatnya TW I sangat rendah dikarenakan karena pemerintah cenderung membelanjakannya di akhir-akhir tahun serta banyak skali syarat-syarat untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran kegiatan tersebut tertunda. Padahal apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun “*

Diharapkan pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, merata sehingga memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian dan penyerapan anggaran awal tahun lebih maksimal.

Menurut Operator Tepra BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Mohamad Bayu pada tanggal 11 April 2016

*“....sebenarnya Mekanisme TEpra adalah konsep N-1, BPMPD harusnya menyelesaikan setiap tahap proses pengelolaan anggaran dengan cara mencicil mendahului tenggat waktunya yang telah ditetapkan atau tak boleh terlambat apabila terlambat maka konsekuensi yang diterima oleh BPMPD yaitu pelaporan TEpra pada Pra Rapim dan*

*Rapim akan mengalami penurunan atau tidak mencapai target.”*

Secara operasional dimulai dengan penyusunan rencana aksi berisi antara lain jadwal target lintasan kritis rencana aksi tepra yang di evaluasi pada level manajer SKPD khususnya BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah melalui pra rapim tepraantisipasi dilakukan, yaitu upaya preventif agar target dapat di capai. Agenda pra rapim tepra berupa arahan umum kondisi aktual pelaksanaan pembangunan, evaluasi konsistensi penyelenggaraan anggaran, status pengelolaan data info tepra yaitu pendapatan dan belanja APBD.

Dari beberapa wawancara di atas Peneliti berkesimpulan bahwa Penyebab persentase laporan realisasi keuangan dan fisik TEpra awal tahun sangat kecil yaitu banyaknya program kegiatan dilaksanakan di awal tahun ternyata pelaksanaannya bergeser dari perencanaan sebelumnya, hal ini dikarenakan pembahasan anggaran dan Pembuatan DPA yang memakan waktu panjang otomatis berdampak pada proses pencairan anggaran, dan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyerapan anggaran berjalan tidak maksimal atau lambat.

### 4. Perencanaan Yang Matang

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan dan tindakan yang sesuai guna mencapai tujuan bersama. Suatu perencanaan haruslah yang komprehensif yang memaksimalkan total efektifitas organisasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan sasaran-sasarannya.

Tujuan dari perencanaan adalah strategi tangguh yang dapat operasional produk atau jasa-jasa yang tepat, pada waktu yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Perencanaan memberikan alat bagi individu dan organisasi untuk tujuan menghadapi perubahan lingkungan mereka. Pesatnya politik, teknologi, ekonomi dan bidang-bidang lain yang menunjukkan perlunya perhatian

yang kontinyu untuk merumuskan kembali strategi pengambilan keputusan.

Seperti halnya pernyataan Kasubag Perencanaan dan Program bapak Mohamad Sirhan, SE, M.Si tanggal 18 April 2016 sebagai berikut:

*“...dalam hal ini perencanaan harus fleksibel, artinya setiap saat dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada, situasi dan kondisi pada waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya perencanaan itu disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian di tahun sebelumnya, namun dalam prakteknya sering terjadi berbagai penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan, contoh yang bisa saya berikan seperti masalah waktu kegiatan, berbenturan jadwal pusat, anggaran yang belum ada dan lain sebagainya”.*

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada umumnya, lebih banyak perhatian dicurahkan kepada perencanaan daripada pelaksanaan. Perencanaan itu merupakan kegiatan intelektual atau pemikiran, sedangkan pelaksanaan itu berorientasi pada tindakan.

Terdapat masukan yang baik dari Kasubag Keuangan dan Asset Aminsuddin, Spd, M. Si pada tanggal 18 April 2016 mengenai perencanaan yang matang sebagai berikut :

*“...Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikuti berbagai pihak untuk memperoleh masukan (input) agar lebih sempurna. Dengan adanya partisipasi BPMPD akan memperoleh manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi lebih baik, juga dapat menambah semangat kerja pada pegawai.*

Dari masukan di atas peneliti berkesimpulan bahwa perencanaan yang matang dan diikuti dengan dukungan dari semua perangkat SKPD yang ada di BPMPD akan membuat semua pelaksana Program dan Kegiatan akan berpartisipasi dengan dan baik serta menambah semangat para pegawai

dalam bekerja guna kelancaran program kegiatan.

Berdasarkan informasi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan dari perencanaan suatu kegiatan perlu menghimpun sumber daya, menstrukturkan hubungan kerja, memadukan fungsi dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kebijaksanaan, rencana dan prosedur. Mencapai sasaran dalam sistem yang baik, sistem yang baik disini yaitu terkontrolnya antara realisasi keuangan dan fisik yaitu realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan bahkan belum dilaksanakan semuanya tergantung dari sumber daya manusianya, perencanaan kegiatan akan berhasil dari sebuah strategi yang digunakan sumber daya manusia karena dorongan, semangat dan pemikiran yang cemerlang yang menghasilkan hasil maksimal..

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah yang berada pada bagian hilir dari siklus pelaksanaan anggaran adalah akibat kurang matangnya perencanaan yakni penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berada pada bagian hulu. Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat jelas pada pelaporan Format TEPRAs tiap bulannya, pada format TEPRAs jg dapat sangat jelas dilihat Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) mana yang lambat melaksanakan program/kegiatan yang telah ditargetkan dalam anggaran kas dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang belum memasukkan kelengkapan berkas pada belanja modal/pengadaan amupun pemeliharaan. Untuk itu, seluruh kegiatan di bagian hulu harus disempurnakan dengan mengupayakan agar seluruh aktivitas perencanaan dilakukan pada tahun N-1

Pernyataan Operator TEPRAs BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2016 bapak Mohamad Bayu sebagai berikut:

*...format TEPRRA sebenarnya baik dan menggenjot PPTK. dan dengan TEPRRA setiap bulannya bisa melihat kegiatan mana lagi yang harus dilaksanakan dan kapan bisa dilaksanakan, TEPRRA juga sebagai alarm bagi PPTK untuk segera mempercepat realisasi keuangan maupun fisik, tapi putaran uang kadang tidak mencukupi untuk kami mempercepat kegiatan, kami harus menunggu uang dari Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan lagi.*

Dari wawancara diatas bisa di simpulkan bahwa dengan adanya TEPRRA memotifasi para PPTK untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di BPMPD karena dengan pelaksanaan yang tepat waktu sehingga berpengaruh pada Pelaporan realisasi anggaran pada TEPRRA.

Dari Pernyataan informan tersebut diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ada perencanaan yang kurang matang pada pelaksanaan kegiatan dan program di BPMPD, setiap tahunnya putaran Uang Persediaan atau UP tidak terlalu jauh pada putaran uang persediaan tahun sebelumnya, sehingga bendahara bisa mengantisipasi kegiatan mana yang lebih diutamakan untuk secepatnya dilaksanakan yang mana bisa menunggu, dan PPTK harusnya bisa menggenjot realisasi untuk laporan yang dimasukkan pada format TEPRRA dengan mempercepat pertanggungjawaban untuk dimasukkan dan di proses di keuangan sehingga UP bisa digunakan untuk kegiatan lain, disini diperlukan kerjasama yang baik pada Tim keuangan dan PPTK di BPMD.

## **5. Penyusunan Program Yang Tepat**

Penyusunan program disini mempunyai garis lurus pada perencanaan yang matang, Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJM, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas kegiatan organisasi untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait,

Perencanaan program dan penyusunan usulan kegiatan belum dapat dilakukan sebelum adanya pembagian program kerja, yaitu suatu tugas atau kewenangan yang diberikan kepada pejabat terkait untuk menyelenggarakan suatu bentuk kegiatan. Tujuan dari pada pembagian ini adalah untuk menghindari terjadinya kegiatan yang sama baik waktu maupun bentuk kegiatan antar lembaga, dan tujuan lainnya adalah agar dalam melaksanakan kegiatannya dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan mana kegiatan yang sifatnya umum atau lebih terarah pada tujuan dari setiap SKPD.

Seperti halnya dikatakan oleh Kasubag Perencanaan dan program bapak Mohamad Sirhan, SE, M.Si, hasil wawancara peneliti pada tanggal 2 Mei 2016 yaitu sebagai berikut:

*“...Dalam merencanakan suatu program, yang harus bidang perhatikan yaitu proses pembuatan program yang tetap ada dengan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, identifikasi program maksudnya disini bidang harus mengidentifikasi program yang mereka rencanakan mempunyai nilai kepentingan bagi masyarakat atau tidak, mempunyai langkah-langkah dalam penyusunan rencana program dan terakhir bidang harus menjadwalkan rencana program mereka sebelum benar-benar menyusun program mereka menjadi sub kegiatan yang akan dilaksanakan, yang seperti ini dek kadang saya sulit untuk memberikan pemahaman pada bidang sehingga mereka sering merevisi kegiatan mereka dengan mengganti dan menyusun kembali kegiatan mereka di pergeseran, saya juga tidak menyalahkan penyusunan yang di ajukan bidang karna sebelumnya mereka ada kordinasi pada pusat atas kegiatan yang mereka usulkan”*

Dapat penulis simpulkan dari pernyataan diatas bahwa Kepala Bidang dan Pejabat Pembuat tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk mempunyai andil besar dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatan, apabila bidang tidak menghasilkan

rencana dan penyusunan yang matang maka penyerapan realisasi anggaran mengalami penyusutan yang signifikan pada laporan keuangan, disini di butuhkan PPTK lebih jeli lagi mengevaluasi setiap rencana dan penyusunan program kegiatan ditahun berlanjut.

Dari hasil kurang jelinya PPTK melihat atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang bisa menghambat penyerapan realisasi anggaran sehingga, permasalahan yang sama terus berulang di tahun-tahun selanjutnya.

Seperti yang dinyatakan oleh Kasubag Keuangan dan Assret di BPMPD tanggal 4 Mei 2016 yaitu sebagai berikut:

*"...Dalam penyusunan program yang tepat pada BPMPD sebenarnya sub-sub kegiatan dari program di kantor ini sudah tepat tiap tahunnya, karna kegiatan yang dilaksanakan masih sama tiap tahunnya, adapun menghilangkan atau menambah kegiatan baru itupun dikarenakan kebijakan dan keputusan pusat untuk meniadakan kegiatan tersebut dengan alasan pemanfaatan bagi pemberdayaan masyarakat masyarakat dan pemerintahan desa, penyusunan kegiatan kami terlebih dahulu mengkoordinasikan pada pusat"*

Dengan adanya pernyataan diatas terdapat pendapat yang berbeda dari sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi PPTK dan Pusat harusnya dilakukan di akhir Tahun saat perencanaan dan penyusunan anggaran dibuat.

Sesuai hasil waawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan di BPMPD sebagian besar mengikuti jadwal pusat, adapun penyerapan realisasi anggaran diawal Triwulan Satu dikarenakan penyesuain jadwal, tapi dapat diketahui bahwa laporan format tepra efektif dan efisien dalam terapannya, dimana dengan laporan format tepra BPMPD bisa melihat tiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan, akan dilaksanakan bahkan belum dilaksanakan baik belanja jasa maupun belanja modal, untuk mengetahui

keefektifitasan dan efisiensi penyerapan anggaran tetap akan dilihat di akhir tahun, karna efektifitas dan efisiennya suatu penyusunan kegiatan dapat dilihat diakhir realisasi kegiatan, apakah mempunyai banyak silpa atau tidak, dari laporan format tepra dapat sangat jelas terlihat seberapa besar realisasi dan silpa di BPMPD, dan apabila sudah dapat pula terlihat dan dijabarkan hambatan apa yang ada di BPMPD sehingga mempunyai penyerapan realisasi yang rendah, semua dikupas pada saat rapim terakhir untuk bulan desember.

Dalam pendekatan strategis terdapat pada status merah, dimana status merah ini adalah program atau kegiatan yang tidak dapat direalisasi karena dana awal belum ada atau penyesuaian jadwal kegiatan pusat, target anggaran kas merupakan patokan laporan TEpra untuk menjadi target realisasi perbulannya yang sudah di rencanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tiap bidang. Dapat dilihat jelas pada tabel sebagai berikut:

Berdasarkan data diatas secara umum kinerja belanja Badan Hasil wawancara dengan Sekretaris BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah bapak Drs. Joko Hariyanto SE, M. Si pada tanggal 09 Mei 2016 yang menyatakan bahwa :

*"...Bidang di perencanaan dan program di BPMPD sudah melakukan evaluasi dan pengawasan laporan keuangan dan fisik cukup menggunakan laporan format tepra, sehingga bila ada satu PPTK yang menghambat penyerapan anggaran kami bisa langsung mengundang PPTK yang dimaksud dengan menanyakan kendala atau hambatan yang didapatkan PPTK sehingga tidak atau belum melaksanakan kegiatannya"*

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan format tepra menjadi tolak ukur bagi pejabat perencanaan dan program untuk mengawasi dan mengevaluasi dengan mudah setiap arus kegiatan di Dinas dan lebih cepat mengetahui setiap program dan kegiatan yang menjadi

hambatan pada peningkatan penyerapan realisasi anggaran.

Hasil wawancara penulis dengan Operator TEPRAs BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah bapak Mohamad Bayu tanggal 10 Mei 2016, menyatakan sebagai berikut:

*...kegiatan kami selalu mendapatkan merah pada laporan TEPRAs karna kegiatan di bidang UEM sering tidak sesuai dengan anggaran kas, kami menunggu jadwal pusat untuk melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan untuk TW I sering meleset dilaksanakan di TW II, begitupun kegiatan TW II kadang jatuhnya pelaksanaan di TW III.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat penulis simpulkan bahwa penyusunan program di BPMPD sering tidak tepat sasaran dalam format TEPRAs, karna format TEPRAs penentuan waktu penyelesaian kegiatan menyesuaikan dengan anggaran kas, BPMPD perlu evaluasi lagi dalam penyusunan program agar bisa dan harus mempunyai tolak ukur dari tahun sebelumnya atas jadwal pusat yang menghambat efektifitas pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada laporan format TEPRAs. Dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat sesuai dengan salah satu cita-cita dalam nawa cita bahwa Negara hadir dalam kehidupan warga negaranya.

## **6. Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Drs. Joko Hariyanto, M, Si tanggal 11 Mei 2016

*“....Sarana dan prasarana sebagai alat untuk mempermudah pegawai dalam melaksanakan tujuan kegiatan yang dimaksud dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses program kegiatan, kami mengadakan sarana dan prasana tiap tahunnya baik itu berupa fisik maupun pemeliharaan demi kelancaran tugas pegawai. Pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya”.*

Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses kegiatan untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Selain faktor manusia sebagai penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuan, maka sarana dan prasarana juga merupakan factor yang turut menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi, bagaimanapun tersedianya sumberdaya manusia yang handal dan memadai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang diharapkan tidak akan terwujud tanpa adanya sarana dan prasarana yang menunjang, demikianpun sebaliknya sarana dan prasarana yang tidak didukung dengan sumber daya manusia yang handal tentu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Tengah yaitu pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tengah yang telah ditentukan/ditunjuk baik melalui Surat Keputusan pembentukan Tim maupun sesuai tupoksi pegawai. Operasional sistem ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tengah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam penyelesaian laporan format tepra mempunyai dan diberikan sarana dan

prasarana yang cukup memadai, sehingga tidak ada keluhan dan bisa memberikan hasil yang efektif dan maksimal dalam hasil akhir penyelesaian laporan tepra.

## 7. Pelaksanaan Efektifitas dan Efesien

Perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari perkembangan status keuangan perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk melihat tingkat produktivitas perusahaan dimasa lalu dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Salah satu bentuk laporan keuangan yang digunakan semua SKPD di provinsi sulawesi tengah adalah laporan format TEpra. Laporan Format TEpra menyajikan arus keuangan dan fisik di SKPD. Laporan TEpra akan menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kegiatan pada SKPD.

Seperti pernyataan Kasubag Perencanaan dan Program BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Moh, Sirhan SE, M. Si yaitu sebagai berikut:

*“Dengan adanya laporan format TEpra maka kegiatan - kegiatan dan perputaran keuangan di dinas sangat transparan, tidak dapat menyembunyikan arus keuangan maupun kegiatan yang di dinas, satu laporan format TEpra saja bisa menyajikan berbagai laporan dan evaluasi satu dinas baik keuangan, pelaksanaan kegiatan, pembangunan, maupun lelang, format ini sangat efektif dan efisien”.*

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Laporan format tepra merupakan laporan yang digunakan oleh Dinas untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung maupun yang sedang maupun belum berlangsung, dan merencanakan aktivitas dan pembiayaan kegiatan selanjutnya.

Efektifitas dan efesien pelaksanaan kegiatan pada instansi atau kantor dimana standar atau ukuran yang pasti dalam menilai suatu program kegiatan yang dilakukan oleh instansi berjalan dengan konsep efisiensi dan efektifitas sangatlah sulit karena itu semua bergantung bagaimana pihak pengelola atau pejabat teknis dari instansi menilai semua program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga bisa diketahui kegiatan atau usaha yang mana telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal sehingga konsep efisiensi dan efektifitas yang diinginkan oleh instansi dapat terwujud.

Seperti yang dikatakan oleh Kasubag Keuangan dan Asset BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Aminsuddin, SPd, M. Si tanggal 30 Mei 2016:

*“...Laporan tepra sudah menjadi ukuran SKPD dalam memonitoring serta mengevaluasi laporan keuangan dan fisik, tiap bulannya kami menghadiri rapat untuk mengevaluasi kegiatan dan perputaran uang pada dinas kami, sehingga kami dapat mengetahui hambatan yang ada dan mencarikan solusi disetiap hambatan yang ada, dan tidak sering saya mewakili subag keuangan, serta subag perencanaan, PPTK untuk merapatkan hasil evaluasi tersebut pada Kepala dinas dan sekretaris.*

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa format tepra menjadi salah satu tolak ukur dinas dalam melihat kinerja setiap Pejabat pemegang tekhnis kegiatan di dinas serta mengontrol, monitoring dan mengevaluasi setiap langkah,pencapaia serta hambatan yang ada BPMPD provinsi sulawesi tengah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat-rapat dengan semua pihak terkait baik mingguan, dua mingguan maupun bulanan. Rapat mingguan dan dua mingguan dilaksanakan baik di tingkat SKPD dipimpin oleh kepala SKPD, sedangkan tingkat Provinsi dipimpin oleh Pejabat Penghubung Provinsi, sedangkan rapat bulanan dalam bentuk Rapim dipimpin oleh Gubernur,

diikuti oleh Kepala SKPD Provinsi se-Sulawesi Tengah Tengah.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Drs. Joko Hariyanto tanggal 30 Mei 2016

“....pada Dasarnya yang dimonitor pada rapat-rapat tersebut adalah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi bagi pemecahan masalah pada masing-masing SKPD. Pada awal tahun pembahasan di fokuskan pada barang dan Jasa kemudian pada akhir tahun umumnya di fokuskan pada Realisasi Keuangan dan Fisik”

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Dalam Rapim akan di perlihatkan besaran Progres yang di capai pada setiap SKPD.

Setiap bulannya SKPD yang mempunyai Progres rendah diberikan peringatan dan dimasukkan dalam pemantauan khusus dimana monitoring dilaksanakan secara sangat intensif. Bagi SKPD yang realisasi penyerapannya melampaui target/rencana, maka kepada SKPD tersebut diberi reward dalam berbagai bentuk.

Kegiatan pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan rapim bulanan. Pelaporan hasil rapim yang meliputi progres penyerapan anggaran bulanan realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah dilaporkan oleh TEPPRA Provinsi kepada TEPPRA Pusat di UKP-PPP sesuai format yang telah ditetapkan. Laporan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

2. Keberadaan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

(TEPPA) bakal digunakan sebagai alat monitoring bagi Kepala SKPD dalam mengontrol atau pun mengawasi kinerja seluruh satuan kerja di BPMPD, pasalnya data TEPPA merupakan data yang valid dan tidak bisa direkayasa.apa yang ditulis atau

dilaporkan operator terkait realisasi penyerapan anggaran di BPMPD benar-benar sesuai dengan data atau informasi dari masing-masing PPTK, apabila ada pemalsuan laporan kinerja terkait penyerapan anggaran maka hal itu secara otomatis akan ketahuan dalam laporan TEPPA, oleh karena itu keberadaan Laporan TEPPRA menjadi alat untuk memonitoring kinerja BPMPD.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Sultan M, M.Si dan Dr. Mustainah, M.Si yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Etzioni, Amitai. 1995. *Manajemen Kualitas*, Gramedia. Jakarta
- Gibson, James L, Ivancevich, M dan Donnelly James J, 1997, *Organisasi Manajemen Perilaku, Struktur, Proses*, Terjemahan Djoebanwahid, Erlangga. Jakarta
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Cetakan
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK )*. Jakarta: Salemba Empat.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan Telematika di Indonesia;
- Islamy Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- keempat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Komaruddin, 1994, *Esiklopedia Manajemen*, edisi kesatu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Ghalia Indonesia Jakarta
- Nugroho Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Managemen Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang “Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan” ;
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”
- PP No 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan”;
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang ”Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah“
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata, *Islamic Financial Management*:
- S. Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Tangkilisan S. Nogo Hesel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)” ;
- Wicaksono Widya Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta